

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kebijakan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang lumrah di Negara yang menerapkan Demokrasi khususnya Indonesia. Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses untuk memberikan kebebasan, kesempatan serta kewenangan kepada masyarakat dalam mencegah dan memecahkan berbagai persoalan secara mandiri. Sebagai bentuk praktek dari sebuah pembangunan konsep partisipasi baru diusulkan dan dibicarakan pada tahun 60-an yang mana saat itu berbagai lembaga Internasional membahas serta mempromosikan partisipasi dalam praktek pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi. Dalam sebuah pembangunan masyarakat merupakan titik yang sentral hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dalam berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri seperti contoh, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi local, dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat dilingkungannya yang selanjutnya hal tersebut akan memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan partisipasi memiliki landasan hukum yang tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa partisipasi merupakan hak dasar warga Negara, dan partisipasi Politik sebagai sebuah prinsip dasar demokrasi. Selanjutnya dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No 6 tahun 2014

bahwa sebuah pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidupnya, penanggulangan kemiskinan serta pembangunan sarana dan prasarana wilayah juga pembangunan potensi ekonomi local, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam partisipasi masyarakat terdapat berbagai macam bentuk partisipasi mulai dari keikut sertaan masyarakat secara langsung dalam sebuah program yang diberikan oleh pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti tenaga, pikiran maupun barang yang bersifat materil seperti sumbangan dana dan pemberian barang bernilai guna untuk menunjang kesejahteraan bersama. Selama ini bentuk partisipasi masyarakat masih terbatas hanya pada keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disusulkan oleh pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak terbatas pada saat bentuk pelaksanaan saja melainkan mulai dari tahapan dasar seperti perencanaan serta pengambilan keputusan.

Kota Bandung dalam menunjang kegiatan pembangunannya berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disebut dengan PIPPK. Program tersebut diusung oleh Ridwan Kamil yang merupakan bentuk upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam percepatan proses pembangunan kewilayahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kebijakan tersebut dituangkan

kedalam regulasi peraturan wali kota nomor 281 tahun 2015 yang isinya masyarakat harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pada evaluasi sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan pengembangan potensi manusia atau masyarakat. Pola pembangunan tersebut merupakan pola pembangunan dari bawah keatas (*bottom up*) yang mana program pelaksanaan pembangunan diusulkan dari masyarakat ke pemerintah melalui rukun warga (RW), Karang Taruna, Tim penggerak PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Selain bertumpu pada tujuan diatas PIPPK juga diharapkan dapat meningkatkan peran, tugas, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh pamangku kebijakan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PIPPK dalam optimalisasinya sering juga mengalami hambatan seperti jumlah penduduk yang mau berpartisipasi dan luasnya wilayah cakupan pelayanan hal tersebut mengakibatkan pada kurang meratanya pembangunan khususnya yang dirasakan oleh Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Selain masalah tersebut dalam pelaksanaannya program kerja yang dilaksanakan menggunakan sistem tender atau pihak ketiga, dimana yang seharusnya pelaksanaan pembangunan berbasis terhadap masyarakat hanya dapat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan saja yang mana hal itu masih tidak seluruhnya terlaksana dengan baik, yang mengakibatkan implementasi pola tersebut banyak mengandung kelemahan seperti contoh, partisipasi masyarakat

sebagai objek penerima manfaat sangat lemah selanjutnya dalam koordinasi ditingkat lebih rendah (Kelurahan) terkadang tidak didengar oleh pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu jika terus menggunakan pihak ketiga sebagai bentuk dari sebuah pembangunan, dikhawatirkan masyarakat tidak peka terhadap permasalahan di wilayahnya yang selanjutnya masyarakat hanya dapat mencatat daftar kebutuhan yang diusulkan kepada pemerintah kewilayahan dan tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Selain permasalahan tersebut pada kenyataannya masyarakat kadang kala tidak memanfaatkan PIPPK ini sebagai peningkatan potensi dan kesejahteraan di wilayahnya, masyarakat cenderung kurang peduli dalam setiap pembangunan yang terjadi. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan sampai pada evaluasi pada kenyataannya masyarakat masih kurang berpartisipasi karena mininya informasi yang diberikan oleh pemerintah keiwlalahan terlihat dari kurangnya semangat partisipasi masyarakat diwilayah tersebut.

Saat ini metodologi partisipasi dalam pembangunan wilayah sedang mengalami krisis padahal dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan hal yang penting bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri, khususnya keberhasilan PIPPK tidak hanya diukur dari seberapa bagus dan baiknya fasilitas yang diberikan melainkan diukur dari kepekaan masyarakat terhadap setiap permasalahan yang ada di wilayahnya, dengan demikian setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah akan berjalan beriringan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan setiap program yang dijalankan akan selalu tepat sasaran.

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil isu penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui PIPPK (Studi Deskriptif di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung).

B. Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK yang meliputi (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi)

C. Tujuan Penelitian

Dengan berlandaskan focus penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK yang meliputi (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi orang lain selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan pengembangan ilmu pengembangan masyarakat islam dalam kajian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK

2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan asas kebermanfaatan baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijabarkan pada penjabaran berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini peneliti harapkan mampu memberikan wawasan dan sebagai sarana peningkatan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang saat ini sedang di emban oleh peneliti yaitu ilmu pengembangan masyarakat islam.

b. Bagi lembaga perguruan tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literature mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK, selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan tinjauan terhadap peneliti selanjutnya khususnya di Universitas Islam Negeri Bandung dan umumnya bagi peneliti yang lain.

c. Bagi pembuat kebijakan dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mmeberikan gambaran mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK agar dijadikan sebuah rujukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kajian tersebut.

d. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan rujukan dalam mengkaji topic yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian sebelumnya

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Saadah Lutfiah mahasiswa pengembangan masyarakat islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana strategi badan keswadayaan masyarakat mekar sejahtera dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh dengan pelaksanaannya menggunakan model perencanaan sosial dan pelaksanaannya menggunakan model pengembangan aksi sosial yang mana hal tersebut bertumpu terhadap tujuan, proses dan hasil melalui peningatan kesadaran dan pemberdayaan menggunakan kegiatan pelatihan kelompok masyarakat serta melalui relawan-relawan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa di tanah karaeng kecamatan manuju di kecamatan gowa” penelitian tersebut membahas bagaimana tingkat partisi masyarakat dalam pembangunan desa di tanah karaeng dan mengamati factor-faktor apa saja yang dapat

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dapat dianalisis dengan keempat bidang yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil dengan menggunakan skala likert, adapun hasil dari tahapan factor yang mempengaruhi partisipasi pembangunan diantaranya adalah factor internal yang meliputi kesadaran, kemauan, pendidikan, mata pencaharian, dan penghasilan. Sedangkan factor eksternal yakni meliputi pemerinath wilayah dan fasilitas yang tersedia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ainnur Aprilia dengan judul “Upaya Pendampingan Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Kampung Kumuh di Bulak Lor I Kelurahan Bulak Benteng Kecamatan Kenjeran Surabaya” dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai upaya pendamping atau fasilitatro dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan tujuan penelitian yakni meningkatkan kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam pemeliharaan dan melestarikan lingkungan. Latar belakang dari penelitian ini yakni karena munculnya dampak terhadap lingkungan yang timbul karena ketidak pedulian masyarakat terhadap kebersihan di kampung kumuh. Penelitian ini dalam proses pendampingannya menggunakan riset aksi partisipatoris dimana

metode tersebut mendorong masyarakat untuk aktif dalam memecahkan sebuah permasalahan melalui beberapa tahapan analisis agar masyarakat dapat mendeskripsikan permasalahan secara mandiri yang kemudian dapat menentukan solusi bersama-sama.

Penelitian diatas peneliti rasa memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dimana ketiga penelitian tersebut membahas bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui sebuah program.

2. Landasan Teoritis

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya pengikut sertaan atau pengambilan bagian, selanjutnya (Slamet 1994:7) berpendapat bahwa partisipasi merupakan peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam kegiatan perusumusan kebutuhan, perencanaan, dan tahap pelaksanaan baik melalui pikirannya maupun secara aktivitas dalam bentuk fisik. Selanjutnya Cohen dan Uphoff dalam (Astuti 2011:61-63) merumuskan partisipasi kedalam empat bagian yaitu:

- a. Partisipasi merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan alternative bersama masyarakat yang melalui ide atau gagasan dan berkaitan juga dengan kepentingan umum. Implementasi dalam partisipasi tersebut yaitu dengan menyalurkan atau menyumbangkan gagasan melalui forum rapat, pemberian pendapat ataupun argument.

- b. Partisipasi pada pelaksanaan yaitu partisipasi yang meliputi usaha menggerakkan sumber daya secara material seperti penyaluran dana, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan, koordinasi serta penjabaran program.
- c. Partisipasi terhadap pengambilan manfaat yaitu partisipasi yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai yang meliputi sisi kualitas (output kegiatan) ataupun kuantitas (presentase keberhasilan program).
- d. Partisipasi pada evaluasi, pada tahap ini berkaitan dengan program yang telah direncanakan, karena partisipasi bertujuan untuk mengetahui capaian suatu program yang telah dirancang dan telah direncanakan.

Adapun Sherry R. Anstein dalam (Sigit 2013:27) membagi partisipasi dalam delapan bagian tingkat partisipasi dari tinggi kerendah diuraikan sebagai berikut:

- a. *Citizen control* yaitu masyarakat secara penuh berpartisipasi dalam menenatalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan tersebut masyarakat berperan untuk mengatur program ataupun kelembgaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat memiliki wewenang serta dapat melaksanakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang akan melaksanakan perubahan. Hal tersebut merupakan usaha bersama warga yang

langsung berhubungan dengan sumber dana agar dapat memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

- b. *Delegated Power*, dalam tahap ini masyarakat berwenang untuk mengambil keputusan dalam sebuah perencanaan tertentu sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pemerintah harus melakukan negosiasi bersama masyarakat dan tidak memberikan tekanan karena dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- c. *Partner Ship*, masyarakat memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ataupun pemerintahan atas kesepakatan bersama. kekuasaan tersebut dibagi antara masyarakat dan pemerintah dengan demikian kesepakatan yang diambil memiliki tanggung jawab masing-masing yang meliputi perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapi.
- d. *Placation*, pemerintah perlu menunjuk sejumlah individu dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk berpartisipasi dalam sebuah anggota badan public, yang mana anggota tersebut memiliki akses tertentu pada kegiatan pengambilan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaannya setiap gagasan masyarakat atau usulan masyarakat tetap diperhatikan namun kedudukan partisipasinya relative rendah dan keanggotaannya lebih sedikit dibandingkan

dengan pemerintah, Jadi dalam tahapan ini masyarakat tidak mampu mengambil keputusannya sendiri.

- e. Consultation*, dalam tahapan ini masyarakat tidak hanya diberikan informasi saja melainkan diundang untuk berbagi pendapat walaupun pendapat tersebut tidak menjadi jaminan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Metode yang biasanya digunakan adalah survey mengenai arah pemikiran masyarakat ataupun pendapat dengan masyarakat.
- f. Informing*, dalam tahap ini pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja yang dijalankan, masyarakat tidak dilibatkan untuk mempengaruhi hasil terkait dengan program kerja tersebut. Informasi yang diberikan dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan namun tidak ada Feedback ataupun kekuatan dalam melakukan negosiasi dari masyarakat. Masyarakat hanya diberikan informasi pada tahapan akhir dari sebuah perencanaan program kerja dan tidak bisa mempengaruhi perencanaan tersebut.
- g. Therapy*, pemerintah hanya berpura-pura melibatkan masyarakat dalam sebuah kegiatan, tujuannya hanya untuk mengubah pola pikir masyarakat.
- h. Manipulation*, tahapan ini merupakan tahapan yang paling rendah dari partisipasi dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Hal tersebut berkenaan dengan kegiatan manipulasi informasi

untuk memperoleh dukungan public dan memberikan janji meskipun janji tersebut tidak akan pernah terjadi.

Delapan tingkatan partisipasi tersebut selanjutnya dibagi kedalam tiga kelompok yang mana *manipulation* dan *therapy* merupakan bentuk dari masyarakat yang tidak dilibatkan dari partisipasi sedangkan dalam bagian *informing*, *consultation* dan *placation* merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam bentuk penerimaan ketentuan, selanjutnya *delegated power*, *partner ship* dan *citizen control* merupakan bentuk partisipasi penuh yang dilakukan oleh masyarakat.

Mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada kalangan ilmuwan menyimpulkan bahwa bila masyarakat tidak diikutsertakan secara dini dalam proses perencanaan pembangunan sulit diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Siagian dalam (I Nyoman Sumaryadi 2010:54) menyatakan bahwa pembangunan untuk masyarakat akan terwujud dengan cara atau melalui dan bersama rakyat sendiri. Ide atau rencana dibawa dalam rapat dan rakyat diberitahu serta diajak untuk berdiskusi.

Dalam upaya perubahan perbaikan kearah yang lebih baik tentu membutuhkan partisipasi masyarakat selaku objek dari sebuah pembangunan yang mana menurut Gunawan dalam (Nasrullah 2016:5) pembangunan adalah proses yang bersifat historical dimana setiap

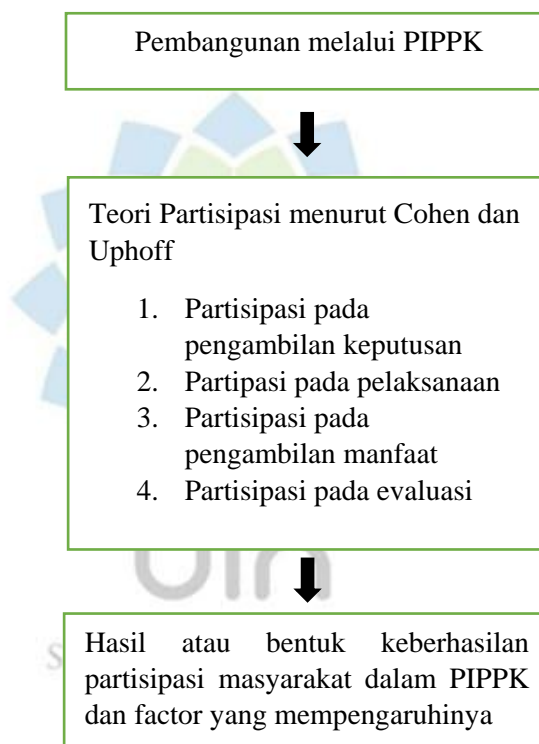
prosesnya bergulir dari waktu-waktu dan tidak akan pernah berhenti, dengan demikian masyarakat harus terus dilibatkan didalamnya.

Selanjutnya menurut Moeljarto dalam (Nasrullah 2016:6) pemabngunan sendiri bermakna Development yang artinya adalah sebuah upaya untuk memajukan kondisi masyarakat disuatu wilayah dengan konsep pembangunan tertentu. (Nasrullah 2016:6) berpendapat bahwa pembangunan merupakan peningkatan nilai sesuatu yang sudah ada adapun juga pembangunan berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah pembangunan juga secara luas merupakan suatu proses yang berkesinambungan secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik dengan ruang lingkup diantaranya pemabngunan dibidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang keagamaan, dan bidang lingkungan.

Dalam upaya pembangunan tersebut pemerintah kota bandung mengeluarkan kebijakan pembangunan melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang mana program tersebut di implementasikan kedalam peraturan Wali Kota nomor 281 tentang PIPPK, dimana PIPPK merupakan program pembangunan yang didalamnya melibatkan masyarakat secara langsung melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) yang meliputi RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna. Hal tersebut merupakan upaya pendekatan yang dilakukan untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak utama dalam

pembangunan, yang mana pendekatan tersebut lebih erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yang mana menurut (Nasrullah 2016:144) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kuasa terhadap masyarakat dan memnadirikin masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri.

3. Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini hal-hal yang menjadi ruang lingkup penelitian diantaranya adalah pembangunan melalui PIPPK yang khususnya dalam kegiatan partisipasi masyarakat yang akan di olah menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang selanjutnya akan menghasilkan bentuk keberhasilan partisipasi dan factor apa saja yang mempenagruhi partisipasi masyarakat dalam pemabangunan melalui PIPPK.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Cipadung Jl. Desa Cipadung RT. 001 RW. 13 Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dimana peneliti memilih lokasi tersebut karena dalam pelaksanaan observasi awal peneliti melihat keaktifan masyarakat dalam kegiatan pembangunan melalui PIPPK.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme adalah paradigma berdasarkan fenomena terjadi dalam realitas. Paradigma merupakan model ilmu pengetahuan ataupun kerangka berpikir yang menjadi pandangan mendasar para ilmuwan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan, sedangkan pendekatan sendiri adalah sebuah aktivitas penelitian untuk memberikan hubungan dengan narasumber yang akan diteliti untuk memberikan dan mencapai pengertian tentang penelitian rumusan masalah.

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana menurut (Hikmat 2011) metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan informasi atau

data secara deskriptif yang meliputi kata-kata yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dari narasumber. Dengan demikian jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang mana penelitian deskriptif adalah pengumpulan data dasar yang sifatnya menerangkan suatu hubungan unntuk menjawab hipotesis dengan perencanaan yang disusun secara sistematis, akurat dan factual.

4. Jenis Data

Dalam memperoleh data peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang mana Bogan dan Taylor berpendapat dalam (Moleong 2016) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengumpulkan data deskriptif seperti kata atau kalimat dari setiap perilaku individu yang diteliti. Peneliti berharap dengan dipilihnya penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang objektif akurat dan menyeluruh sesuai dengan keadaan dilokasi penelitian.

Jenis data daam penelitian ini meliputi :

- a. Data mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK
- b. Data mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat daam pembangunan melalui PIPPK
- c. Data mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan cipadung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daam pembangunan melalui PIPPK

Jenis data dalam penelitian ini bersumber pada individu, buku, dokumen dan lain-lain. Jika dalam sebuah penelitian peneliti menggunakan kuesioner ataupun wawancara maka setiap narasumber yang menjawab pertanyaan penelitian didalamnya disebut juga sebagai sumber data (Kuswana:2011)

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Sehingga teknik yang digunakan oleh narasumber antara lain observasi dan wawancara dengan Lurah Cipadung sebagai informan utama dan kasi-kasi kelurahan Cipadung sebagai informan kunci dan LKK sebagai informan pendukung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan pustaka yang berkaitan dengan bahan penelitian seperti laporan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, dan disertasi).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian dan gejala-gejalanya,

dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Observasi memiliki tujuan diantaranya pertama, dalam mengamati tingkah laku individu sebagai aktifitas yang actual memungkinkan peneliti memiliki pandangan tingkah laku sebagai suatu proses, kedua, tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi sosial yang dapat diperoleh dengan cara lain, ketiga, tahapan ini juga berguna untuk mengeksplorasi data penelitian. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut peneliti mengamati lokasi penelitian secara langsung bagaimana kegiatan PIPPK di Kelurahan Cipadung khususnya dalam bidang partisipasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan Tanya jawab secara lisan maupun tulisan antara individu ataupun kelompok, jika wawancara tersebut dilakukan secara lisan biasanya wawancara dilakukan saling berhadapan dan pertanyaan wawancara biasanya diarahkan pada rumusan masalah yang sedang diteliti. Dalam tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak kelurahan Cipadung yaitu lurah cipadung bpk Lukman Ependi, S.Pd., Sekretaris Lurah bapak Sulbeni, S.Ap., M.S.I., ibu Kasi Pemerintahan Sugiartini, dan RW Kelurahan Cipadung selaku Informan dengan mengajukan pertanyaan, dan meminta keterangan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK.

c. Studi Dokumentasi

Dewi Sadiyah (2015:91) berpendapat bahwa dalam tahapan ini proses pengumpulan data yang diperoleh dalam studi dokumentasi meliputi dokumen-dokumen baik dalam catatan, buku, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, laporan penelitian, jurnal, dan lain-lain. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan perbandingan atas kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dalam penelitian.

d. Teknik Penentuan Kehabsahan Data

Dalam tahapan ini peneliti menggunakan proses triangulasi yang mana teknik tersebut menurut William Wiersma dalam Sugiono (2007:372) merupakan proses pengamatan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan jenjang waktu, dengan demikian triangulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu, Triangulasi sumber, Triangulasi pengumpulan data dan Triangulasi waktu. Dari ketiga jenis tersebut peneliti menggunakan kehabsahan data dengan triangulasi sumber sebagai upaya peneliti untuk mengungkap serta menganalisis masalah penelitian, dengan demikian dalam teknik pengumpulan kehabsahan data peneliti menggunakan metode *triangulasi observers*.

7. Pengelolaan dan analisis data

Analisis data adalah penyederhanaan hasil dari penelitian kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami pada tahapan ini peneliti

menggunakan analisis data berdasarkan dengan jenis data kualitatif yang dirumuskan oleh (Emzir 2012:129-133) sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya peneliti menelaah dan membandingkan untuk memperoleh kebenaran dari setiap sumber .

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, pentransformasian, serta penyederhanaan abstraksi dari sumber data awal yang dilaksanakan saat pencatatan lapangan secara tertulis, tahap reduksi data dilaksanakan setelah observasi awal dilakukan karena dalam kegiatan observasi peneliti mendapatkan gambaran awal lokasi penelitian yang selanjutnya peneliti memfokuskan penyederhanaan data pada rumusan dan tujuan masalah yang ingin dicapai.

c. Dikategorisasi

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data yang telah difokuskan kedalam kategori-kategori. Selanjutnya peneliti mengkategorikan data meliputi partisipasi, factor-faktor dan strategi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PIPPK

d. Pengambilan kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari setiap aktivitas analisis dan penarikan verifikasi kesimpulan setelah data terkumpul secara lengkap untuk memudahkan peneliti dalam penguasaan data.

